

STRATEGI POLITIK PARA PEREMPUAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI SULAWESI UTARA PADA PEMILU 2019

Oleh :
Michael J. M. Inkiriwang¹

ABSTRAK

Semenjak dibukanya keran keterlibatan perempuan dalam politik, telah membuka kesempatan bagi para perempuan untuk duduk di lembaga legislative. Namun mereka tetap diwajibkan untuk bertarung dalam hal menarik dukungan dari masyarakat pemilih. Untuk itu mereka juga wajib menyiapkan strategi politik agar bisa memperoleh dukungan maksimal dari masyarakat. Penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai strategi yang dilakukan oleh para perempuan yang terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) tahun 2019. Hal itu akan dikaji dengan menggunakan konsep strategi politik dari Peter Schroder yang mengkategorisasi strategi politik ke dalam dua jenis, yaitu strategi ofensif dan strategi defensive. Dengan menggunakan metode kualitatif, temuan penelitian menggambarkan beberapa strategi yang dilakukan oleh para perempuan anggota DPRD Sulut diantaranya adalah melakukan identifikasi profil dan segmentasi pemilih, melakukan publikasi diri, mensosialisasikan program, dan membentuk tik sukses yang tangguh.

Kata Kunci: Strategi Politik

ABSTRACT

Since the opening of the tap for women's involvement in politics, it has opened opportunities for women to sit in the legislative body. But they are still obliged to fight in terms of attracting support from the constituency. For that they are also obliged to prepare a political strategy so that they can get maximum support from the community. This research will identify the various strategies undertaken by women who were elected as members of the Regional Representative Council (DPRD) of North Sulawesi Province in the 2019 Legislative Member Election (Pileg). This will be examined using the political strategy concept of Peter Schroder which categorizes strategies. politics into two types, namely offensive strategy and defensive strategy. Using qualitative methods, the research findings describe several strategies adopted by women members of the DPRD of North Sulawesi, including identifying profiles and segmentation of voters, conducting self-publication, socializing programs, and forming a strong success tick.

Keywords: Political Strategy

PENDAHULUAN

Berbagai tindakan afirmatif terkait dengan keterwakilan perempuan dalam politik sudah dilakukan sejak lama. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik. Untuk itu capainya hingga saat ini harus dijaga, bahkan jika perlu dapat ditingkatkan. Karena keberadaan mereka merupakan salah satu upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik. Melalui regulasi pemilu, berbagai tindakan afirmatif telah sejak lama dilaksanakan demi meningkatkan partisipasi perempuan di dalam politik. Dapat dilihat dari pasal 65 ayat 1 UU No 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD yang menyebutkan, "setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”.

Pada pemilihan legislatif di provinsi Sulawesi Utara tahun 2019, berbagai upaya politik gencar dilakukan oleh partai politik demi memuluskan langkah calonnya melenggang ke parlemen. Bentuk kampanye yang tepat merupakan salah satu strategi keberhasilan caleg perempuan dalam memenangkan suara masyarakat. Untuk itu, caleg memang harus terlebih dahulu memetakan dan memahami apa yang menjadi permasalahan di dapil masing-masing. Dengan mampu memahami dan memberikan solusi yang tepat terkait permasalahan yang dihadapi, otomatis caleg perempuan tersebut berpotensi besar merebut hati masyarakat.

Perencanaan strategi kampanye yang tepat dan efektif tentunya akan menjadi cara agar caleg perempuan dapat memperoleh suara yang maksimal di dapilnya masing-masing. Calon legislatif perempuan dituntut harus dapat merumuskan strategi kampanye yang berbeda dengan strategi yang dilakukan oleh caleg laki-laki pada umumnya. Karena akan menjadi sia-sia apabila tetap menggunakan strategi lama dalam menyiasati citra dan elektabilitas yang dimiliki caleg laki-laki di mata publik. Terlebih lagi pemilih Indonesia kini telah menjelma menjadi pemilih yang cerdas dan mampu mengevaluasi berbagai intrik-intrik politik calon. Caleg perempuan harus dapat mengusung strategi kampanye yang nantinya akan dapat menjawab segala permasalahan perempuan di dapil mereka masing-masing.

Keterlibatan perempuan di dalam politik dewasa ini harus dapat memberikan kontribusi nyata melalui tindakan dan sumbangsi pemikiran terhadap suatu permasalahan sosial. Khususnya mencarikan solusi terhadap berbagai problem perempuan di masa kini. Kasus pemerkosaan, KDRT, human trafficking, meningkatnya angka PSK, kekerasan terhadap TKW, merupakan permasalahan yang tidak hanya sekedar membutuhkan terciptanya aturan yang populis dan pengimplementasiannya secara konsisten, namun juga membutuhkan pengawasan yang betul-betul akuntabel terhadap pelanggaran aturan tersebut, karena permasalahan yang serupa juga pernah terjadi sebelumnya, namun selalu terulang akibat ketidakseriusan pemerintah mengawal pelaksanaan UU tersebut. Dengan kata lain kehadiran sosok anggota DPRD perempuan sangat dibutuhkan khususnya dalam menangani permasalahan perempuan di masyarakat, karena adanya kecenderungan terhadap pemikiran dan perasaan senasib sepenanggungan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Strategi Politik

Slamet Sutrisno berpendapat bahwa ciri-ciri pendekatan strategi yakni memusatkan perhatian pada tujuan, memperhitungkan faktor waktu dan lingkungan, serta merumuskan masalah yang terjadi dari peristiwa-peristiwa yang ditafsirkan sesuai konteks kekuatan dan memperhitungkan pilihan-pilihan, langkah yang diambil dalam rangka menuju tujuan tersebut. (Slamet Sutrisno, 1983:61). Berdasarkan ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa strategi merupakan inti tempat semua kegiatan utama dijalankan.

Strategi politik dengan melakukan pendekatan dan komunikasi politik perlu dilakukan oleh para kontestan untuk dapat memenangkan pemilu. Para kontestan perlu melakukan kajian untuk mengidentifikasi besaran (*size*) pendukungnya, massa mengambang dan pendukung kontestan lainnya. Identifikasi ini perlu dilakukan untuk menganalisis kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh pada saat pencoblosan, juga untuk mengidentifikasi strategi pendekatan yang diperlukan terhadap masing-masing kelompok pemilih. Strategi ini perlu dipikirkan oleh setiap kontestan karena pesaing juga secara intens melakukan upaya-upaya untuk memenangkan persaingan politik. (Firmanzah, 2007:123).

Disamping itu partai politik juga perlu melakukan strategi pemetaan karakteristik pemilih, karena dimasyarakat terdapat kelompok masyarakat yang lebih menggunakan logika dan rasionalitas dalam menentukan pilihan terhadap kontestan. Kemampuan partai politik dalam memecahkan persoalan masyarakat menjadi titik perhatian kelompok masyarakat ini. Namun banyak juga kelompok masyarakat yang memilih karena memiliki kedekatan ideologis. Mereka memperdulikan program apa yang ditawarkan oleh partai politik. Asalkan ideologi partai sama dengan ideologi pemilih maka cukup alasan untuk mencoblosnya.

Partai politik perlu menggunakan penguatan yang bersifat rasional ketika mereka berhadapan dengan konstituen yang lebih mengedepankan *problem solving*. Ketika partai politik harus berhubungan dengan konstituen yang lebih melandaskan alasan memilih pada aspek non-irasional, maka penguatan ideologi perlu dilakukan. Mengingat pesan, nilai, norma dan paham partai perlu ditekankan dalam hal ini. Strategi menanamkan keyakinan lebih sesuai untuk diterapkan pada jenis pemilih yang *non-partisan*, yaitu dengan cara meyakinkan kepada pemilih secara *problem solving* dan *ideologis*, strategi komunikasi dan penyediaan informasi yang juga mereka perlukan. Strategi pengenalan dan merebut dapat dilakukan suatu partai terhadap jenis pemilih yang merupakan pendukung partai lain.

Berangkat dari berbagai fenomena dan pengertian "strategi" yang ada, muncul istilah strategi politik, yang diterjemahkan sebagai segala tindakan terencana yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita politik. Oleh sebab itu merupakan sebuah keharusan bagi politisi untuk memiliki strategi politik jika ingin mewujudkan cita-cita politik, karena tanpa strategi, pencapaian tujuan utama dalam merebut maupun mempertahankan kekuasaan akan sulit terwujud. Dalam implementasinya di dunia politik, para politisi akan menggunakan strategi politik untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi. (Schroder 2004: 9)

Hal ini menandakan bahwa Schroder sangat memahami jika pada praktiknya, strategi politik yang dijalankan politisi untuk mencapai tujuan politiknya tidaklah kaku dan seragam. Dalam menjalankan suatu strategi, politisi akan melakukan apapun sepanjang sebuah perencanaan yang diimplementasikan untuk mencapai tujuan politik itu tidak melanggar aturan hukum. Inilah yang menyebabkan strategi politik yang digunakan oleh para politisi tersebut bisa jadi bervariasi, tergantung dari situasi dan kondisi yang dihadapi. Walaupun dalam praktiknya penggunaan strategi politik sangat beragam, namun pada hakikatnya para politisi yang sedang merancang sebuah strategi tetap mengacu pada dua pola dasar, yakni pola ofensif (menyerang) dan defensif (bertahan).

a. *Pola strategi ofensif*

Akan diperlukan bilamana seorang kandidat/partai politik ingin menarik pendukung baru maupun memperluas jumlah dukungan masyarakat. Biasanya kandidat maupun partai politik yang menggunakan pola strategi ofensif ini lebih dikenal sebagai pihak penantang maupun "pendatang baru" yang akan berkompetisi untuk mengincar kursi kekuasaan. Cara yang dapat digunakan adalah melalui kampanye politik.

b. *Pola Strategi Defensif*

Sangat ideal digunakan bagi politisi pemegang kekuasaan maupun partai politik penguasa yang ingin terus berupaya mempertahankan kekuasaannya atau tetap menjaga dominasinya. Strategi ini juga digunakan apabila partai pemerintahan atau sebuah koalisi pemerintahan yang terdiri atas beberapa partai ingin mempertahankan mayoritasnya atau apabila perolehan suara yang dicapai sebelumnya ingin dipertahankan. Dengan melakukan berbagai tindakan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Berusaha memelihara pemilih tetap mereka dan memperkokoh solidaritas pemilih agar tidak mudah diambil kompetitor lain
2. Memperkuat pemahaman kepada para pemilih terhadap program-program yang telah mereka anggap berhasil.
3. Berupaya menjalankan operasi disinformasi, dengan mengaburkan perbedaan yang ada dengan pesaing, hingga membuat perbedaan tersebut tidak dapat dikenali lagi.

Selain dari dua pola dasar strategi di atas, Schroder juga menambahkan bahwa dalam keadaan tertentu, politisi maupun partai politik bisa saja menerapkan pola ofensif dan defensif sekaligus yang sering disebut sebagai pola strategi campuran/kombinasi. Satu hal yang juga perlu disadari bahwa walaupun pola ini relatif lebih berisiko, namun pola campuran / kombinasi ini terkadang sangat menjanjikan untuk diimplementasikan demi mencapai keberhasilan.¹⁰ Berbagai pola dasar dalam merancang sebuah strategi di atas diharapkan mampu menjadi acuan bagi politisi untuk mewujudkan cita-cita / tujuan politiknya. Kendatipun dalam menjalankan sebuah strategi, tidak ada aturan baku ataupun sebuah keterikatan bagi politisi/partai politik (ketika dihadapkan pada kondisi tertentu), untuk selalu terikat kepada pola strategi yang harus dijalkannya.

B. Pemilihan Umum (Pemilu)

Menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dimaksud dengan Pemilihan Umum atau selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.

Sedangkan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan proses kegiatan yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang pada gilirannya akan mengendalikan jalannya roda pemerintahan, fungsinya adalah mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemerintahan perwakilan. (Arbi Sanit, 1997:85). Dengan kata lain Pemilu pada dasarnya merupakan penafsiran dan pertarungan diantara massa rakyat untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di parlemen.

Jadi pada hakekatnya pemilu dinegara manapun mempunyai esensi yang sama, pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau negara. (Donald Paulian, 1997:4-5). Pemilu merupakan perwujudan proses pilihan rakyat atas wakil dan pemimpinnya. Sehingga pemilu merupakan jalur mewujudkan bentuk kedaulatan ditangan rakyat. Dengan pemilu berarti bahwa hak dasar warga dipenuhi dalam partisipasinya untuk pengelolaan Negara. Adanya hak pilih dalam pemilu juga merupakan salah satu bentuk terlaksananya *rule of law* dalam negara.

Pemilu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasi aspirasi dan kepentingan warga Negara. Pemilu umumnya memiliki tujuan memilih kepala pemerintahan atau kepala eksekutif dan untuk menggoalkan kebijakan umum yang akan dilaksanakan oleh pemerintah terpilih. Selain itu juga bertujuan memilih anggota lembaga perwakilan (legislative atau parlemen), yang akan menetapkan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan serta mengawasi kegiatan pemerintah demi kepentingan rakyat. Maka pemilu menunjukkan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dipercayakan demi kepentingan rakyat dan bahwa kepada rakyatlah para politisi harus mempertanggung jawabkan tindakan dan kebijakan mereka.

Menurut Ramlan Surbakti 1992:181, ada tiga tujuan pemilihan umum diselenggarakan yaitu:

- a. Pemilu sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum sesuai dengan prinsip demokrasi yang memandang rakyat yang berdaulat, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakilnya.
- b. Pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- c. Pemilu merupakan sarana memobilisasikan dan menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan ikut serta dalam proses politik.

Pemilu juga mempunyai fungsi yang penting dalam kemasyarakatan dan kenegaraan yaitu:

- a. Legitimasi politik (pemerintah dan parlemen).
- b. Terciptanya perwakilan/integrasi politik (integrasi para pemilih dengan para wakil rakyat yang dicoblosnya).
- c. Sirkulasi elite politik (perputaran dan peralihan politik antar partai, antar generasi, dan antar orang/kader).
- d. Pengawasan (pemerintah oleh parlemen, dimana kubu oposisi bercokol).

- e. Persaingan (antara pemerintah dengan oposisi).
- f. Pendidikan politik (pendidikan politik langsung untuk rakyat).

Oleh karena itu pelaksanaan pemilu harus didasarkan parameter yang jelas agar kualitas penyelenggaraan dan hasil pemilu menjadi lebih baik dari pemilu sebelumnya, diantaranya sebagai berikut :

- a. Pemilu harus terselenggara secara demokratis, sehingga memberi peluang bagi semua parpol, calon eksekutif (calek), dan calon legislatif (caleg) yang terlibat untuk berkompetisi secara fair dan jujur. Pemilu harus terlepas dari *fraud*, rekayasa dan manipulasi.
- b. Pemilu harus menciptakan calek dan caleg yang lebih baik, berkualitas, mandiri, dan memiliki akuntabilitas politik yang tinggi. Harus membuat lembaga menjadi produktif, tidak memiliki *vested interest*, dan menghindarkan 5-D baru (datang, duduk, debat, doa dan duit). Dulu konsepnya datang, duduk, diam, dengar dan duit).
- c. Derajat keterwakilan. Yakni harus ada keseimbangan keterwakilan, baik gender, agama, wilayah, elite pusat, daerah dan kota.
- d. Tuntas. Yakni dijamin UU yang menyeluruh, sehingga tidak memerlukan peraturan KPU atau pemerintah yang terlalu banyak, yang mendatangkan kemungkinan multitafsir atas UU.
- e. Pemilu hendaknya bersifat praktis, yakni tidak rumit, gampang dimengerti oleh kalangan masyarakat banyak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dan eksplorasi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, (Lexy J. Moleong, 2008:9). Adapun fokus dari penelitian ini adalah mengidentifikasi strategi para legislator perempuan terpilih pada pemilu legislatif 2019 di DPRD Sulawesi Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh, dianalisa dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menelaah sumber data, yang dimulai dengan keseluruhan data yang tersedia dari sumber baik wawancara maupun sumber lain.
- b. Reduksi data, dilakukan dengan cara melakukan abstraksi usaha untuk membuat rangkaian inti dan pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap pada obyeknya.
- c. Pemrosesan satuan-satuan adalah bagian-bagian terkecil yang mengandung makna yang bulat dan dapat berdiri sendiri lepas dari yang lain.
- d. Pengumpulan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan sejak semula diambil ketika memperoleh data, sehingga menghasilkan kesimpulan yang kuat. Jadi kesimpulan senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung.

PEMBAHASAN

Pemilu 2019, menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Sulawesi Utara mempunyai antusias yang sangat tinggi terhadap pemilu. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya masyarakat yang menggunakan hak pilihnya untuk memilih menunjukkan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara merupakan warga negara yang baik dan demokratis, sehingga pemilu yang diselenggarakan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan teratur.

Provinsi Sulawesi Utara dibagi menjadi 6 (enam) daerah Pemilihan yaitu :

- Dapil I : Kota Manado.
- Dapil II : Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung.
- Dapil III : Nusa Utara, Kabupaten Sitaro, Kabupaten Tahuna, Kabupaten Talaud.
- Dapil IV : Bolmong Raya, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Utara dan Kota Kotamobagu.
- Dapil V : Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara.

- Dapil VI : Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon.

Terkait dengan fokus penelitian, Daerah Pemilihan VI, yaitu Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon, merupakan daerah yang menempatkan keterwakilan anggota dewan perempuan yang pada pemilu 2019 boleh dikatakan naik. Pada daerah pemilihan VI, Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon merupakan daerah yang jumlah calon legislatifnya lumayan banyak, karena menempatkan anggota dewan sebanyak 8 (delapan) orang, dan 4 (empat) diantaranya adalah anggota Dewan perempuan, dapil ini juga merupakan wilayah yang dikenal sebagai daerah yang potensial, mengapa dikatakan demikian, karena Kabupaten Minahasa adalah Kabupaten tertua di Minahasa.

A. Profil DPRD Provinsi Sulawesi Utara

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) Sulawesi Utara adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. DPRD Sulawesi Utara beranggotakan 45 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Sulawesi Utara terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak.

Anggota DPRD Sulawesi Utara yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019, yang dilantik pada 9 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Robinson Tarigan, di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Komposisi anggota DPRD Sulawesi Utara periode 2019-2024 terdiri dari 9 partai politik dimana PDI Perjuangan adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu 18 kursi, kemudian disusul oleh Partai NasDem yang meraih 9 kursi dan Partai Golkar yang meraih 7 kursi.

B. Strategi Anggota Legislatif Perempuan DPRD Sulut Terpilih Pada Pileg 2019

1. Strategi Ofensif

Strategi politik ofensif merupakan strategi politik yang digunakan untuk mempengaruhi pemilih, dan yang harus dijual atau ditampilkan adalah perbedaan terhadap keadaan yang berlaku saat itu serta keuntungan-keuntungan yang dapat diharapkan dari padanya sehingga dapat terbentuk kelompok pemilih baru di samping para pemilih yang telah ada. Oleh karena itu, harus ada penawaran baru atau penawaran yang lebih baik bagi para pemilih yang selama ini memilih partai pesaing.

- Pemetaan Segmentasi Pemilih

Mengacu pada Firmanzah, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasi dasar segmentasi pemilih, yaitu dari kondisi geografi, demografi, psikologi, perilaku (*behaviour*), sosial budaya, sampai sebab-akibat (*causal-based*). Metode segmentasi pemilih dengan teknik segmentasi tersebut di atas bersifat dasar dan *given* artinya pengelompokan kondisi struktural masyarakat (pemilih) akan membentuk perilaku spesifik orang-orang yang berada di dalamnya.

Langkah awal yang dilakukan seluruh anggota legislative perempuan DPRD Sulut yang terpilih, mengaku melakukan segmentasi pemilih. Hal ini bagi mereka penting agar strategi yang di susun dapat lebih efektif dan efisien. Segmentasi dilakukan dengan mengidentifikasi cara bereaksi individu atau masyarakat sebagai pemilih, terhadap suatu permasalahan. Segmentasi sangat dibutuhkan untuk dapat mengidentifikasi karakteristik yang muncul di setiap kelompok masyarakat. Pendekatan yang digunakan untuk satu kelompok tertentu belum tentu sesuai dengan karakteristik kelompok lain. Dalam hal ini legislatif perempuan (caleg perempuan terpilih) terlebih dahulu melakukan aktivitas segmentasi masyarakat untuk mengetahui karakteristik masyarakat, sekaligus untuk mengembangkan pendekatan yang sesuai dengan masing-masing karakteristik. Tujuannya, agar kandidat dapat selalu hadir dalam berbagai karakteristik pemilih. Dalam hal ini yang dimaksud aktivitas segmentasi atau pemetaan masyarakat pemilih, yaitu (1) identifikasi dasar segmentasi pemilih, dan (2) menyusun profil dari hasil segmentasi pemilih.

- **Pembentukan Tim Sukses**

Strategi umum yang dilakukan oleh sebagian besar peserta kontestasi politik adalah membentuk tim sukses. Tim sukses merupakan salah satu tools bagi calon untuk membantu mereka dalam membantu menyusun program, mengimplementasikan program, serta mensosialisasikan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh calon yang didukungnya.

Terkait hal ini beberapa informan mengaku keberhasilan mereka tidak terlepas dari tim sukses yang dimilikinya. Mereka sangat membantu berbagai aktifitas yang dilakukan selama masa kampanye. Dalam pembentukan tim sukses, beberapa informan mengaku ada yang datang menawarkan diri secara langsung akan membantu, ada juga yang sengaja di minta oleh calon untuk membantu.

- **Pemanfaatan Media Massa dan Media Cetak.**

Sebagai salah satu pilar penting dalam demokrasi, strategi pemberitaan media massa ikut menentukan hitam putihnya kekuatan politik untuk merebut hati rakyat. Media massa sering dijadikan partner dalam berbagai aktivitas politik di Negara-negara maju. Tujuannya yaitu untuk menghimpun suara serta memperoleh legitimasi dari masyarakat. Keterkaitan media massa maupun media cetak dengan politik disinyalir memberikan pengaruh terutama dalam pembentukan citra politikus. Melalui media massa dan media cetak, akan diinformasikan berita-berita yang positif berupa perilaku baik dari politikus yang turut dalam kegiatan sosial dan peduli lingkungan sehingga akan membentuk pendapat umum tertentu bagi yang mereka menyaksikannya. Oleh sebab itu, pemanfaatan media massa secara maksimal akan dibutuhkan dalam menarik hati pemilih untuk memilih calon legislatif perempuan.

Dari konteks aktivitas politik, pemasaran politik dimaksudkan adalah penyebarluasan informasi tentang kandidat dan program yang dilakukan oleh para elit politik melalui saluran-saluran komunikasi tertentu. Hal ini di tujukan kepada sasaran tertentu dengan tujuan mengubah wawasan, pengetahuan, sikap, dan perilaku para calon pemilih sesuai dengan keinginan pemberi informasi. Salah satu cara atau strategi yang digunakan dalam memasarkan program-program politiknya adalah melalui kampanye politik.

Terkait strategi ini beberapa informan mengaku menggunakannya. Bagi calon yang baru pertama kali ikut kompetisi politik mengaku strategi ini sangat membantu dirinya dalam mensosialisasikan diri. Terkait materi publikasi selain profil diri, juga menggambarkan berbagai program yang akan dilakukan. Sedangkan terkait program ada yang merupakan program yang akan dilakukan oleh calon, ada juga yang mendompleng program yang dibuat oleh pemerintah pusat yang dijanjikan akan melakukan pengawalan.

Untuk program pribadi, beberapa informan mengaku bahwa program yang mereka buat sesuai hasil segmentasi yang dilakukan sejak awal. Beberapa program favorit dari sebagai besar calon perempuan sesuai hasil temuan penelitian berkisar di bidang pendidikan dan pertanian. Berbagai program tersebut ada yang dijadikan sebaai program pribadi, ada juga yang menggunakan program pemerintah pusat.

- **Interaksi Langsung**

Dalam hal strategi interaksi langsung, yang dilakukan oleh sebagian besar calon, yaitu dengan melakukan orasi secara langsung dan terbuka yang berisi himbauan, ajakan, bahkan doktrin. Tujuannya utamanya adalah untuk menarik massa dan mengumpulkan suara sebanyak mungkin. Selain menyampaikan visi misinya, mereka memanfaatkan kondisi tersebut untuk menebar isu-isu dan janji-janji kepada masyarakat. Berinteraksi secara langsung dengan masyarakat merupakan suatu strategi yang dapat digunakan caleg untuk menarik simpati masyarakat. Dalam proses ini masyarakat akan dapat menilai bagaimana kualitas caleg yang akan terlihat dari isu yang dibawanya serta bagaimana cara caleg merespon segala pertanyaan dan permintaan masyarakat di dapilnya. Kesan awal yang baik akan sangat membantu caleg untuk dapat melakukan pendekatan lebih intens kepada masyarakat.

Terkait materi yang digunakan dalam interkasi langsung, menurut beberapa informan diambil dari hasil pemetaan masyarakat pemilih yang ada di dapil masing-masing. Hal itu dilakukan agar apa yang mereka sampaikan dapat mengena sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan riil di masyarakat dapil masing-masing.

- **Berpartisipasi Langsung Dalam Kegiatan Masyarakat**

Berpartisipasi disini bertujuan untuk mengubah perilaku khalayak secara konkret dan terukur. Disini mereka menunjukkan simpati dan kepeduliannya kepada masyarakat, yaitu dengan cara melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat seperti melakukan bakti sosial dan pengadaan fasilitas umum dalam masyarakat.

Terkait strategi ini beberapa informan mengaku dengan memberikan bantuan baik materi maupun non materi dalam berbagai kegiatan, sedikit banyaknya masyarakat akan mulai mencari tahu dan mengenal sosok mereka. Masyarakat akan merasa senang ketika diperhatikan dan diayomi. Bantuan materi maupun non materi merupakan salah satu bentuk kepedulian caleg terhadap konstituennya yang tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan ikatan emosional diantara mereka.

2. Strategi Defensif

Strategi defensif pada dasarnya merupakan strategi untuk mempertahankan pasar. Hal inilah yang kemudian menempatkan strategi ini sebagai strategi yang khas untuk mempertahankan mayoritas pemerintah yang kemudian akan membuat partai politik untuk memelihara pemilih tetap mereka dan memperkuat pemahaman para pemilih sebelumnya terhadap situasi yang berlangsung.

- **Penguatan Forum Dapil**

Menjelang pemilihan legislatif 2019, seluruh calon legislatif saling adu kekuatan atau yang biasa di sebut adu strategi. Tentu dalam kompetisi politik seluruh calon ingin menjadi pemenang, Namun masyarakat masing-masing punya kriteria untuk memilih wakilnya. Pada pemilihan legislatif diperlukan strategi yang merupakan hal utama dalam menghadapi kompetisi politik. Strategi tersebut tentu bertujuan untuk simpatik masyarakat dan memperoleh atau pun mempertahankan suara sebanyak-banyaknya pada pemilihan legislatif 2019. Dengan adanya penetapan dapil digunakan oleh para caleg untuk membentuk forum dapil dimana hal ini bertujuan agar masyarakat lebih mengetahui, memahami visi misi sang caleg sehingga masyarakat mau memberikan suaranya kepada caleg tersebut.

Di dalam forum dapil yang juga harus diperhatikan caleg adalah pembentukan basis kekuatan setiap dapil (Tim Sukses). Dengan adanya basis kekuatan (tim sukses) maka caleg dapat mempertahankan suaranya pada saat pemilu. Peran tim sukses antara lain:

1. Sebagai ujung tombak penyerap aspirasi masyarakat, karena tim sukses berasal dari masyarakat, jadi dari mereka-mereka lah para caleg mengetahui apa kebutuhan masyarakat dalam merencanakan program pembangunan daerah.
2. Sebagai pemberi ide. Tiap-tiap wilayah kegiatannya berbeda sesuai kebutuhan dan selera tim sukses agar mampu menarik massa agar mau berkumpul, memilih dan mempertahankan.

Dalam strategi politik bukan hanya memberikan janji-janji politik dengan beragam program unggul yang mengatas namakan kepentingan rakyat, juga diperlukan pendekatan secara persuasif, agar terus tercipta kedekatan emosional.

Dengan menjalin komunikasi yang baik dengan konstituennya, maka mampu menciptakan dan membangun kedekatan emosional dengan konstituennya, sehingga konstituennya merasa begitu dekat dengan wakil rakyatnya. Kedekatan yang persuasif menjadi titik tolak kampanye. Terkait hal ini, dari keterangan yang diberikan oleh beberapa informan, mereka membangun citranya melalui pendekatan persuasive.

PENUTUP

Pada Pileg 2019, para perempuan yang terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara melakukan beberapa strategi, yang membuat mereka terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. adapun beberapa strategi yang dilakukan dapat dikategorikan ke dalam dua pola strategi yaitu strategi yang sifatnya ofensif dan strategi yang sifatnya defensive.

Untuk strategi ofensif hampir keseluruhan menggunakan beberapa strategi diantaranya; melakukan pemetaan segmentasi pemilih, pembentukan tim sukses, pemanfaatan media, melakukan interaksi langsung dengan masyarakat di dapilnya melalui kampanye, serta berpartisipasi langsung dalam berbagai kegiatan masyarakat di dapil masing-masing. Sedangkan untuk strategi defensive yang dilakukan sebagian besar dari mereka adalah penguatan forum dapil atau tim sukses yang dimiliki pada setiap dapil masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmanzah, 200. *Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realitas*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Moleong, J, Lexy, 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Paulian, Donald, 1997. *Menggugat Pemilu*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sanit, Arbi, 1997. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Schroder, Peter. 2008. *Strategi Politik. Indonesia*. Jakarta: Friedrich-Naumann
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widia Sarana, Jakarta.
- Sutrisno, Slamet, 1983, *Sedikit Tentang Strategi kebudayaan Nasional Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Sumber lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU No 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD
- UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dimaksud dengan Pemilihan Umum